



## **Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara**

### ***The Role of The Village Head in Improving Community Welfare In Gonting Garoga Village, Garoga District, North Tapanuli Regency***

**Kristina Pasaribu, Abdul Kadir & Yurial Arief Lubis\***

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan dari Sondang P Siagian (2004) yang ditentukan dari 4 dimensi yang melekat pada peran yaitu Stabilisator, Inovator, Pelopor, Modernisator. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat diukur dari keempat indikator, tiga indikator dapat dikategorikan sangat tidak optimal baik meliputi Inovator (Pembaharuan), Pelopor dan Modernisator. Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala desa dan perangkat desa, ketua BPD, serta masyarakat. Objek yang diteliti ialah peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan menggunakan indikator Ketiga indikator tersebut masih sangat jauh didapatkan di Pemerintahan Desa Gonting Garoga. Indikator yang cukup optimal yaitu Stabilisator, yaitu menciptakan kestabilan baik dari segi keamanan dan juga ketertiban di tengah-tengah masyarakat Gonting Garoga. Adapun faktor penghambatnya meliputi Sumber Daya manusia, baik Kepala Desa, aparat dan juga masyarakat Gonting Garoga sendiri, Masyarakat tidak menginginkan perubahan dan pendidikan politik yang rendah.

**Kata kunci:** Peranan; Kepala Desa; Kesejahteraan.

#### **Abstract**

*The purpose of this study was to describe the role of the village head in improving community welfare in Gonting Garoga Village, Garoga District North Tapanuli Regency. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The subjects of this study were the village head and village apparatus, the head of the BPD, and the community. The object studied was the role of the village head in improving community welfare by using indicators from the part that is determined from the four. The results of this study indicate that the role of the Village Head in improving community welfare is measured from the four indicators, three indicators can be categorized as not optimal either including Innovators (Renewal), Pioneers and Modernizers (Thinking Forward). these three indicators are still very far from being found in the Gonting Village Government. Garoga, however, there is one indicator that is quite optimal, namely the stabilizer, which is to create stability both in terms of security and order in the midst of the Gonting Garoga community. The inhibiting factors include human resources, both the village head, officials and also the Gonting Garoga community themselves, people who are less interested in change.*

**Keywords:** Role; Village Head; Welfare

**How to Cite:** Pasaribu, K. Kadir A. & Yurial, A.L. (2023). Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pemerintahan (JIAAP)*, 2(1) 2023: 38-46,

\*E-mail: [kristinapasaribu@gmail.com](mailto:kristinapasaribu@gmail.com)

ISSN [2828-6537](https://doi.org/10.31289/jiaap.v2i1.609) (Online)



## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi Indonesia yang menjadi dasar hukum tertinggi negara ini. Salah satu aspek penting yang diatur dalam UUD 1945 adalah tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia. UUD 1945 mengamatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah propinsi dan dalam propinsi tersebut terdapat kabupaten dan kota. Ini menciptakan struktur tata negara yang bersifat terpusat, dengan tingkatan pemerintahan yang terbagi mulai dari pemerintah pusat hingga tingkat pemerintahan daerah terendah (Sembiring, 2014). Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan di tingkat propinsi, kabupaten, dan kota, peraturan-peraturan dan undang-undang yang mengatur tata cara pemerintahan daerah sangatlah penting. Hal ini mencakup sejumlah peraturan perundang-undangan yang merinci tugas, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah daerah, serta hubungan mereka dengan pemerintah pusat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pembagian sumber daya, anggaran, dan pungutan pajak yang diperbolehkan oleh pemerintah daerah (Apriani et al., 2022; Mariana Br Simamora et al., 2022) (Haeba et al., 2021).

Penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah adalah komponen yang sangat penting dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia. Hal ini memungkinkan negara untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, memahami kebutuhan khusus setiap daerah, dan menjalankan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya dasar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang jelas, pengelolaan pemerintahan daerah dapat berlangsung secara efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Ini merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang berpusat pada prinsip negara hukum dan demokrasi (Almond Verba Sidney, 1984; Ekatjahjana, 2015; Prayogi, 2018).

Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah suatu terobosan yang sangat positif dan diharapkan dapat memberikan dorongan bagi peningkatan berbagai program pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Desa-desanya di Indonesia tetap menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena mereka merupakan sumber daya yang penting dalam proses pembangunan. Peran desa sebagai tulang punggung dalam pembangunan nasional sangatlah signifikan (Andika & Tarigan, 2013; Tahun et al., 2014; Yudarta & Winaya, 2018).

Salah satu elemen kunci dalam sistem otonomi desa adalah eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif di tingkat desa. Otonomi desa memungkinkan BPD untuk memainkan peran yang penting dalam mengawasi proses pembangunan desa. Keputusan dan kebijakan yang diambil di tingkat desa seringkali melibatkan kerjasama antara pemerintahan desa dan BPD. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran BPD dalam mengamati, mengawasi, dan memberikan masukan terkait kebijakan-kebijakan yang berdampak pada masyarakat desa (Kusmanto, 2013; N. M. dan I. Nasution, 2014; Setiawati, 2018, 2018). Selain itu, desa-desanya tetap menjadi prioritas dalam pembangunan nasional karena mereka merupakan basis pertumbuhan ekonomi, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, dan berbagai kebutuhan penting lainnya. Oleh karena itu, pembangunan di pedesaan memiliki peran sentral dalam memperkuat kerangka pembangunan nasional. Melalui otonomi desa dan peran aktif BPD, diharapkan bahwa desa-desanya di seluruh Indonesia akan dapat mengatasi tantangan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional secara keseluruhan (Dauwole et al., 2017; Saragi et al., 2017).

Kesuksesan pembangunan di desa sangat bergantung pada dukungan yang kuat dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Pemerintah desa memiliki peran penting sebagai pelayan masyarakat, dan untuk menjalankan perannya dengan baik, mereka harus memiliki kemampuan yang optimal dalam mengelola program-program pembangunan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu mendukung program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara pemerintah desa dan masyarakatnya sangat diperlukan (Ismid et al., 2020; Rafi'atul Hadawiya et al., 2021). Kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat adalah kunci keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa dapat menjadi penggerak partisipasi masyarakat, sedangkan masyarakat dapat berperan sebagai kontributor aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.



Keduanya saling mendukung dan saling melengkapi dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa. Ini menciptakan sinergi yang kuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan (Simanjuntak & Hutabalian, 2020; Syafrizal & Resdati, 2020).

Selain itu, peran aparat pemerintah desa juga sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor seperti sikap mental, disiplin, dan pendidikan dalam bidang pelayanan akan memengaruhi pelaksanaan tugas aparat pemerintah desa. Kualitas aparat pemerintah desa juga dapat dilihat dari kemampuan optimal kepala desa dalam mengelola kepemimpinan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembangunan. Dengan memiliki aparat pemerintah desa yang berkualitas, pemerintah desa dapat lebih efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan menggerakkan pembangunan di desa mereka (Kurniaty et al., 2021). Kualitas pelaksanaan tugas oleh aparat pemerintah desa, dengan kepala desa yang unggul, memainkan peran penting dalam mencapai pelaksanaan pembangunan yang optimal. Aparat pemerintah desa adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa, sebagai administrator utama, memiliki tanggung jawab besar dalam mengkoordinasikan dan memimpin berbagai inisiatif dan strategi Pembangunan (Asrori, 2014; F. A. Nasution, 2020; Purba & Djamin, 2015).

Peran kepala desa tidak hanya terbatas pada administrasi rutin, tetapi juga sebagai sumber inovasi untuk menggagas gagasan-gagasan baru dan strategi yang mendukung pembaharuan dan pembangunan di desa. Kemajuan suatu daerah sangat bergantung pada kemampuan dan kesungguhan desa dalam mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karena itu, kepala desa yang memiliki kualitas baik dan kompeten dapat menjadi pendorong utama dalam mencapai perkembangan positif di desa mereka (Hardiansyah et al., 2019; Irfan & M. tahir, 2020; Lubis et al., 2019; Oktavia & Prayetno, 2018; Saputra et al., 2022; Soni, 2023). Dalam konteks ini, kepala desa harus memiliki kemampuan untuk memimpin, mengelola sumber daya, dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan desa. Kepala desa yang berkualitas akan dapat memotivasi masyarakat dan aparat pemerintah desa lainnya untuk bekerja sama dalam mewujudkan visi pembangunan desa yang lebih baik. Kesuksesan pelaksanaan pembangunan di desa sangat bergantung pada kemampuan dan tekad kepala desa dalam mengemban peran penting ini.

Menurut, (Siagian, 1991), Peranan kepala desa adalah sebagai berikut: 1) Stabilisator, Usaha dalam pelaksanaan Kepala Desa untuk menciptakan kestabilan dalam bidang Pembangunan; 2) Inovator, Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang Pembangunan; 3) Pelopor, Usaha yang dilaksanakan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan disegala bidang Pembangunan; 4) Modernisator, upaya Kepala Desa untuk selalu bijaksana dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan.

Keempat peran tersebut menjadi penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan aman. Jadi berdasarkan penjabaran tentang peran yang dimaksudkan tidak hanya tentang jabatan semata seseorang yang harus dihormati masyarakat, tetapi peran seseorang harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat baik dari segi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harus memperhatikan keamanan dan kedamaian masyarakat dengan merangkul setiap masyarakat tanpa memandang status sosial seseorang agar tercipta harmonisasi antara pemerintahan desa dengan masyarakat setempat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menitikberatkan pada peran manusia sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk lebih fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang terjadi di lapangan (Moleong, 2016). Peneliti secara langsung terlibat dalam pengumpulan data dengan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa informasi dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2016). Metode penelitian kualitatif ini melibatkan pengumpulan data primer di

lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pelaku utama dalam proses kebijakan di Desa Gonting Garoga.

Lokasi penelitian dilakukan di kantor Kepala Desa Garoga Julu yang terletak di Desa Garoga Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Informan penelitian terdiri dari berbagai pihak yang memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan terkait objek penelitian, termasuk Kepala Desa, BPD, Sekretaris, pegawai desa, dan masyarakat setempat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Dengan menggunakan berbagai teknik ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang peran pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya (Miles et al., 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga

Kesejahteraan dalam masyarakat Desa menjadi prioritas utama dalam pembangunan dan tujuan desa dimana kesejahteraan yang paling ditekankan yaitu dari segi ekonomi masyarakat desa yang masih sangat rendah, dan yang menjadi faktor penghambat kesejahteraan masyarakat yang kurang memiliki keahlian, dan kurangnya partisipasi pemerintah setempat dalam mesosialisasikan tentang perkembangan teknologi yang sudah semakin maju sehingga masyarakat kurang terbuka terhadap perubahan-perubahan.

Untuk mengetahui Peran Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Gonting Garoga Kec Garoga, peneliti menggunakan indikator (Siagian, 1991). yang ditentukan dari 4 dimensi yang melekat pada peran dioperasikan sebagai berikut:

#### 1. Stabilisator

Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan. Dalam hal ini perlu peran Kepala Desa, bila keadaan kondisi lingkungan maupun masyarakat tidak stabil maka sulit untuk diselenggarakannya berbagai kegiatan Pembangunan (Siagian, 1991). Menurut Informan Kunci yaitu Bapak Baliga Pasaribu selaku Kepala Desa Gonting Garoga Kec Garoga Kab.Tapanuli Utara, menjelaskan bahwa:

Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam menciptakan kestabilan dalam bidang pembangunan. Dalam hal ini perlu peran Kepala Desa, bila keadaan kondisi lingkungan maupun masyarakat tidak stabil maka sulit untuk diselenggarakannya berbagai kegiatan pembangunan.

Menurut Informan Kunci yaitu Bapak Baliga Pasaribu selaku Kepala Desa Gonting Garoga Kec Garoga Kab.Tapanuli Utara, menjelaskan bahwa: "Dalam menciptakan kondisi aman dan tentram di desa Gonting Garoga sendiri bukanlah hal yang mudah karna pada saat pemilihan kepala desa dilaksanakan banyak masyarakat yang bermusuhan antara tim yang menang dan yang kalah.saya cukup berhasil menciptakan kestabilan di Desa ini karna saya merangkul semua golongan masyarakat dan terbukti sampai saat ini keadaan desa Gonting Garoga aman dan damai, meskipun ada satu dua yang masih tidak berkenan dengan kepemimpinan saya".

Hal serupa disampaikan oleh salah satu warga di Desa Gonting Garoga yang bernama yaitu Ibu Tongku pasaribu selaku masyarakat Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan bahwa: "Keadaan di Desa Gonting Garoga sendiri ya seperti itulah dimana pihak yang kalah dalam pemilihan hanya bisa diam mengiyakan semua keputusan pemerintahan desa agar tercipta keamanan di desa ini tapi terlepas dari itu semua terkait keamanan dalam pembangunan infrastruktur tersebut terkait dengan pembebasan lahan warga tidak mendapat kendala apapun karena tanah dibeli pemerintahan setepat dimana dalam hal menjual lahan tidak lah hal yang asing bagi warga Gonting Garoga".

Berdasarkan wawancara diatas dapat dilihat bahwa peran kepala desa dilihat dari indikator stabilitator masih kurang efektif dimana masih ada masyarakat yang kurang berkenan dengan kepemimpinan bapak Baliga Pasaribu.

#### 2. Inovator (pembaharuan)

Usaha yang dilakukan Kepala Desa dalam membuat pembaharuan disegala bidang pembangunan. Kepala Desa haruslah dapat berpikir strategi dan mampu mencermati berbagai perubahan secara tepat sekaligus menjawabnya, karena seorang Kepala Desa yang efektif yaitu

dapat memberikan solusi dan mendorong perubahan serta mempersiapkan untuk menghadapi perubahan dan pengembangan terhadap perubahan (Siagian, 1991). Peneliti kembali mencari Informasi terkait dengan indikator Inovator (pembaharuan) kepada informan utama yaitu Bapak Parlin Pasaribu selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan bahwa: "Kalau untuk inovasi sendiri itu memang betul banyak terjadi di kepemimpinan kepala desa saat ini, tetapi saya sebagai ketua BPD melihat sendiri bahwa setiap usulan atau ide-ide yang diambil kurang banyak melibatkan kepala desa yang lebih banyak diam ketika dilaksanakan rapat atau musyawarah di kantor kepala desa".

Kemudian peneliti kembali mencari informasi kepada informan tambahan yaitu itu Bapak Sahat Pardosi selaku masyarakat Desa Gontig Garoga menyatakan bahwa: "Kalau untuk inovasi secara formal saya harus akui ada, tapi untuk apa berinovasi kalau tidak berazas manfaat bagi semua golongan masyarakat, kenapa saya berani menyatakan itu karna saya tidak merasa terbantu dengan semua pembangunan yang dilaksanakan karna saya tidak memiliki perkebunan ke jalan yang dibangun tersebut".

Berdasarkan hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan diatas dapat diketahui bahwa Peran Kepala Desa dalam menciptakan hal baru diakui oleh masyarakat desa Gontig Garoga meskipun banyak ide-ide tidak banyak diutarakan kepala desa yang menyebabkan indikator inovasi Kepala Desa tidak terlihat sama sekali karena terlihat orang lain yang bekerja secara nyata.

### **3. Pelopor**

Usaha yang dilakukan Kepala Desa sebagai orang terdepan dalam memberikan contoh suri tauladan dalam penerapan pembaharuan disegala bidang pembangunan. Sebagai pelopor berarti Kepala Desa harus menjadi panutan bagi seluruh masyarakat, orang berjalan didepan. Ini berarti kepeloporan Kepala Desa harus bersifat objektif akan menunjang kelancaran Pembangunan (Siagian, 1991). Menurut Informan Kunci bapak Baliga Pasaribu Selaku Kepala Desa Gontig Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan bahwa: "Memang saya akui saya memiliki banyak kekurangan dalam menciptakan hal hal baru untuk kemajuan desa ini dan lebih banyak dikerjakan oleh asisten saya karna pendidikan saya yang hanya tamatan SMA. Sebagai kepala desa saya berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat Gontig Garoga dimana pada kepemimpinan ini kesejahteraan masyarakat Garoga sudah meningkat dengan terealisasinya pembangunan karna biaya pengakutan hasil pertanian yang semakin hemat dan aman bagi kendaraan baik roda dua maupun roda empat sehingga keuntungan yang didapatkan oleh para petani semakin banyak. Contohnya anak-anak yang sudah banyak mengenyam pendidikan tinggi di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta".

Peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada Informan Utama yang kedua yaitu Bapak Tambok Hasibuan Kaur (Kepala Urusan) Pembangunan Desa di Desa Gontig Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan bahwa: "Sebenarnya sama dengan kepala desa lainnya, kalau bicara pembangunan memang baru pada saat bapak ini memimpin ada pembangunan tapi itu semua karna ada aggaran dana desa tahun 2017 yang sudah seharusnya masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan dan desa".

Kemudian peneliti memberikan pertanyaan yang sama kepada Informan Tambahan yaitu Bapak Sahat Pardosi selaku masyarakat Desa Gontig Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara menjelaskan bahwa: "Saya kurang setuju iya kalau dikatakan beliau berjalan didepan dalam melaksanakan pembangunan-pembangunan di Desa Gontig Garoga ini karena desa lain tanpa ada dana desa, desa lain sudah lebih dulu melaksanakan pembangunan seperti pelebaran jalan ke perkebunan warga." (Rabu, 21 Juli 2020 pukul 11 WIB).

Dari hasil kutipan wawancara tersebut, peneliti dapat mengetahui bahwa Peran Kepala Desa dalam memberikan hal-hal atau ide-ide yang membangun masih belum maksimal banyak yang berpendapat itu dikarenakan usia Kepala desa saat ini sudah tidak produktif lagi sehingga banyak hal yang harus dilakukan oleh orang lain untuk kelancaran pemerintaha di desa Gontig Garoga.

### **4. Modernisator**

Upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam berpikir guna menjadikan pemerintahan yang modern demi tercapainya tujuan pembangunan. Seorang kepala desa diharapkan memiliki pola pemikiran yang maju dan tidak selalu berpatokan kepada pandangan lama (Siagian, 1991). Menurut Informan Kunci bapak Baliga Pasaribu Selaku Kepala Desa Garoga Julu Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara berpendapat mengenai Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa:

“Seperti yang saya jelaskan tadi saya hanya tamatan SMA saja jadi untuk setiap kebijakan-kebijakan saya banyak dibantu oleh orang dalam saya untuk kepemimpinan sendiri saya sudah cukup banyak mengerti karena saya juga sudah lama sebagai raja desa atau istilah di desa ini ” raja huta” di dalam adat yang turun temurun dari kakek buyut saya..... ”

Peneliti kembali mencari informan tambahan yaitu dari dusun lain yaitu dusun lumban pinasa dan juga dusun gonting hopo terkait dengan kepemimpinan Bapak Baliga Pasaribu selaku Kepala Desa saat ini yaitu ibu Roslen Pasaribu yang berdomisili di dusun Lumban Pinasa, beliau menjelaskan bahwa: “Terkait pembangunan yang dilaksanakan di dusun Garoga Julu kami tidak merasakan manfaatnya karena kami tidak memiliki perkebunan di dusun Garoga Julu dan untuk perkembangan SDM sendiri itukan kemauan anak , anak saya tidak tertarik dengan kebijakan tersebut sehingga itupun tidak bermanfaat bagi kami....”.

Berdasarkan hasil kutipan wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kepala Desa Gonting Garoga sendiri telah melaksanakan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa, yaitu yang paling nyata dimana setelah dibangun perkerasan jalan ke perkebunan masyarakat memudahkan akses pengangkutan hasil panen masyarakat menggunakan kendaraan roda empat yang bisa langsung dijual ke kota tentu dengan harga yang lebih tinggi membuat sebagian masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut yaitu para orang tua yang menyekolahkan anaknya sampai keperguruan tinggi sudah meningkat baik negeri maupun swasta.

Namun dari hasil wawancara masyarakat lainnya seharusnya tanggap terhadap masalah-masalah yang terjadi dan kurang dekat dengan masyarakat. Kepala Desa yang kurang menguasai perkembangan zaman terutama di bidang teknologi menyebabkan Desa Gonting Garoga menjadi desa yang kurang produktif dan salah satu desa terburuk di Kabupaten Tapanuli Utara.

### **kendala atau masalah yang menjadi penghambat dari peran Kepala Desa Gonting Garoga dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat**

1. **Sumber Daya Manusia:** Sumber Daya Manusia (SDM) adalah orang-orang yang berkontribusi dalam pembangunan desa. SDM berkualitas tinggi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk menggerakkan pembangunan lebih cepat dan memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara efisien. Namun, jika SDM kurang berkualitas, misalnya karena kurangnya pendidikan atau pelatihan, maka mereka mungkin tidak mampu berpartisipasi aktif dalam musyawarah desa. Hal ini bisa mengakibatkan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kurang mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
2. **Masyarakat yang tidak terlalu menginginkan perubahan:** Di Desa Gonting Garoga, masyarakat mungkin memiliki kekhawatiran atau ketidakpercayaan terhadap perubahan. Karena desa ini jauh dari ibukota, sosialisasi kebijakan dan perubahan bisa sulit. Kekhawatiran ini dapat mengakibatkan resistensi terhadap kebijakan atau program baru, bahkan jika mereka dapat memberikan manfaat. Dalam hal ini, pendekatan komunikasi dan sosialisasi yang efektif sangat penting untuk mengatasi ketidakpercayaan dan membangun dukungan masyarakat terhadap perubahan.
3. **Pendidikan politik yang masih sangat rendah:** Masyarakat yang belum terbiasa dengan proses politik dan pemerintahan desa mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya musyawarah desa dan pengambilan keputusan bersama. Kurangnya partisipasi dalam musyawarah desa dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak mencerminkan kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, edukasi politik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang proses demokratis sangat penting.
4. **Rendahnya Pengetahuan Dan Keterampilan Aparatur:** Aparatur desa yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelayanan publik dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa. Ketika aparatur desa tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang tugas-tugas mereka, pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bisa kurang optimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi aparatur desa perlu ditingkatkan.
5. **Kurang Disiplin:** Ketidaksiplinan dalam birokrasi desa dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa disiplin, tugas-tugas administratif mungkin tidak dilaksanakan dengan baik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas



pelayanan publik dan akuntabilitas. Disiplin adalah aspek penting dalam menjalankan pemerintahan desa dengan efisien.

6. **Partisipasi dan Tindakan Proaktif Masyarakat Masih Sangat Kurang:** Partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan mereka. Ketika partisipasi masyarakat rendah, mungkin ada risiko bahwa keputusan akan diambil tanpa konsultasi atau tanpa mempertimbangkan perspektif masyarakat. Meningkatkan partisipasi dan tindakan proaktif masyarakat adalah langkah penting untuk membangun pemerintahan desa yang lebih inklusif.
7. **Sikap Aparatur Yang Tidak Responsif:** Aparatur desa harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jika mereka tidak responsif, kebijakan dan program yang diterapkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sikap responsif adalah kunci untuk menjaga agar pemerintahan desa fokus pada pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan menghindari pemborosan sumber daya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu: Bahwa peran Kepala Desa Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara jika dilihat dari empat indikator hanya satu yang bisa terlaksana dengan baik, yaitu dari indikator stabilitator , menciptakan kestabilan di Desa Di Desa Gonting Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara karna selama pemerintahan Bapak Baliga semua terkontrol aman. Dari tiga indikator lainnya yaitu pelopor, modernisator dan inovator belum bisa terlaksana dengan optimal bisa dilihat dari pengakuan Kepala Desa sendiri yang kurang menguasai teknologi dan pemikiran-pemikiran atau ide-ide yang jarang diberikan Kepala Desa. Keadaan desa yang masih memelihara sifat primitif juga kurang dapat perhatian dari Kepala Desa.

Faktor yang menghambat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa Gonting Garoga Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Sumber Daya Manusia yang sangat kurang, baik Kepala Desa maupun aparat desa lainnya yang hanya tamatan SMA bahkan ada yang tamatan SMP dan yang paling sangat tidak masuk akal dimana Kepala Desa harus dari satu marga yaitu marga pasaribu sebagai pembuka marga di Desa Gonting Garoga yang belum tentu Sumber Daya Manusianya lebih baik dari marga lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almond Verba Sidney, G. A. (1984). *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. bina aksara.
- Andika, M., & Tarigan, U. (2013). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(2), 98–111.
- Apriani, L., Nasution, I., & Suharyanto, A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perawat terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap di RSUD Dr . R . M Djoelham Kota Binjai The Effect of The Quality of Nursing Services on The Satisfaction of Inpatients In RSU. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(2), 108–114. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1405>
- Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten,. *Jurnal Praja*, 6(2).
- Dauwole, E., Kaawoan, J., & Sendow, Y. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan. *PERSPEKTIF*, 2(2), 1–11.
- Ekatjahjana, W. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*.
- Haeba, A. A., Umar, A., Asis, M., Lisanty, N., Tahir, S. Z. Bin, Suharyanto, A., & Cahyani, H. (2021). The Influence of the Level of Public Awareness and Public Understanding of the Rules on the Achievement of Locally Generated Revenue (PAD) Targets through the Property Tax (PBB) Collection Process. *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 3756–3763.
- Hardiansyah, M., Nasution, M. A., & Matondang, A. (2019). Efektivitas Pelayanan Perangkat Desa oleh Kepemimpinan Kepala Desa (Datuk Penghulu). *Perspektif*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i1.2538>
- Irfan, I., & M. tahir, M. tahir. (2020). Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri. *Edu Sociata (Jurnal Pendidikan Sosiologi)*, 4(1), 37–48. <https://doi.org/10.33627/es.v4i1.410>

- Ismid, F., Kusmanto, H., & Lubis, M. (2020). Analysis of Factors Influencing Performance-Based Regional Revenue and Expenditure Budgeting in the Aceh Singkil District Government. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 129–140.
- Kurniaty, E. Y., Muda, I., Batubara, B. M., Jamil, B., & Suharyanto, A. (2021). Sosialisasi Program Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Kepada Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Untuk Menunjang Program Pemerintah Daerah. *Pelita Masyarakat*, 3(1), 6–16.
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 39–47.
- Lubis, A., Nasution, M. A., & Kusmanto, H. (2019). Peran Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 7(2), 196. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v7i2.3008>
- Mariana Br Simamora, D., Masitho Batubara, B., & Suharyanto, A. (2022). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i1.1185>
- Miles, M. ., Huberman, A. ., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasution, F. A. (2020). Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Membuat Peraturan Desa di Desa Bandar Khalipah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2), 53–60. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i2.2020.%25p>
- Nasution, N. M. dan I. (2014). Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pantai Labu Pekan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 99–110.
- Oktavia, M., & Prayetno, P. (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangurusan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(2), 81–92. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i2.12>
- Prayogi, R. (2018). Peningkatan Kesadaran Demokrasi dalam Organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 1(1), 52–59. <https://doi.org/10.34007/jehss.v1i1.8>
- Purba, I. S., & Djamin, D. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 25–36. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Rafi'atul Hadawiya, Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Saputra, R. E., Batubara, B. M., & Suharyanto, A. (2022). *Peranan Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Simpang Empat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah*. *The Role Of The Village*. 4(2), 157–163. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v4i2.1438>
- Saragi, J., Nasution, I., & Musthafa, W. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan. *Perspektif*, 6(1), 1–7.
- Sembiring, W. M. (2014). Persepsi Konstituen Terhadap Anggota DPRD dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 119–132.
- Setiawati, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>
- Siagian, S. P. (1991). *Teori dan praktek kepemimpinan*.
- Simanjuntak, M. F. E., & Hutabalian, M. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Mengontrol dan Mengetahui Mekanisme Penggunaan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Simalungun. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 743–749. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.411>
- Soni, A. P. (2023). *PERAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI OTONOMI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi pada Desa Sidoharjo Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Syafrizal, S., & Resdati, R. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut di Desa Rimbo Panjang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 712–720. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.399>



- Tahun, S. B., Andika, M., & Batubara, M. (2014). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah , Bandar. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 91-104.
- Yudartha, P. D., & Winaya, I. K. (2018). Desa Membangun: Analisis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1470>